



Anggaran Penyuluh Bahasa

Bali Capai Rp 8,2 M

Denpasar (Bali Post) -

DPRD Bali rupanya masih konsisten memperjuangkan adanya penyuluh tutur bahasa Bali di masing-masing desa. Terbukti, dewan tetap memasukkan anggaran untuk penyuluh tutur bahasa Bali pada RAPBD 2016. Kendati sebelumnya Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemyun menyatakan bila penyuluh, baik agama Hindu maupun bahasa Bali belum bisa diwujudkan tahun depan.

“Kita dulu dari DPRD melalui Komisi IV kan mengusulkan penyuluh agama Hindu dan tutur bahasa Bali. Nah sekarang sudah kita sepakati pertama, itu

cukup mengangkat tenaga penyuluh tutur bahasa Bali yang jumlahnya 716 orang menyesuaikan dengan jumlah desa dinas,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Bali Nyoman Budi Utama di gedung dewan, Selasa (3/11) kemarin.

Budi menambahkan, Pansus RAPBD Bali 2016 sudah merancang anggaran sebesar Rp 8,2 miliar. Masing-masing, Rp 7,2 miliar untuk gaji dan tunjangan BPJS bagi 716 penyuluh, serta Rp 1 miliar untuk persiapan perekrutan dan membuat buku panduan. Masing-masing tenaga penyuluh akan menerima gaji sebesar Rp 1,7 juta.

“Tenaga penyuluh berstatus tenaga kontrak dan baru

efektif itu bulan Juli, sehingga anggaran itu hanya sampai 6 bulan. Kita maklumi terkait masalah perekrutan dan penyediaan kurikulumnya. Nanti untuk tahun berikutnya (anggaran) jelas untuk setahun,” jelasnya.

Politisi PDI-P ini menjelaskan, Dinas Kebudayaan akan menjadi leading sector lantaran terkait pelestarian budaya. Secara teknis, tenaga penyuluh diharapkan berpendidikan minimal S-1 bahasa Bali. Sebelumnya, Sekda Provinsi Bali, Cokorda Pemyun menegaskan bila tenaga penyuluh belum bisa diwujudkan di desa pakraman pada 2016 nanti.

“Jangan sampai ada keinginan bahwa kita meman-

faatkan penyuluh itu hanya untuk tenaga kontrak saja. Itu tidak bagus itu, tetapi harus bermanfaat,” ujarnya. Pemyun mengaku masih melakukan pendalaman kajian agar keberadaan tenaga penyuluh nantinya betul-betul bermanfaat. Meskipun secara ide, pihaknya mengaku sependapat dan mengapresiasi.

“Nah sekarang usul dewan, kami apresiasi semua itu tapi harus lihat juga supaya kita dukung dengan anggaran itu supaya tidak mubazir. Siapa mau disuruh, kemudian apa manfaatnya. Terus dimana kita salurkan,” jelasnya yang juga Ketua Tim Pengkaji usulan tenaga penyuluh. (kmb32)

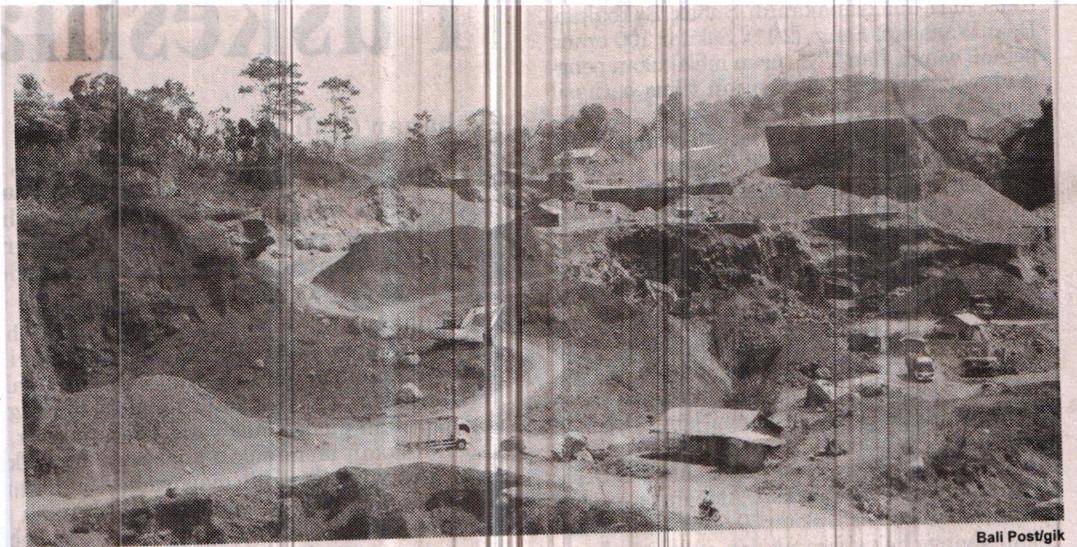
Edisi : Rabu, 4 Nov 2015

Hal : 5



Pengusaha Hanya Keruk Galian C

Tak Mau Tanggung Jawab Mereklamasi Lahan



Bali Post/gik

GALIAN C - Puluhan alat berat sedang bekerja mengeruk galian C di kaki Gunung Agung di Desa Sebudi Kecamatan Selat. Meski seluruh areal galian C di lokasi ini tak berizin, namun aktivitas galian tetap marak.

Amlapura (Bali Post) -

Lokasi galian C di Kabupaten Karangasem cukup banyak. Bahkan, lebih banyak ilegal ketimbang berizin. Sayangnya selesai mengeruk galian C, pengusaha langsung kabur menasar lokasi lain. Mereka tak mau bertanggung jawab mereklamasi kembali lahan tersebut sehingga yang tampak kubangan bekas galian.

hal 1

Edisi : Rabu, 4 Nov 2015

Hal : 13



Sambungan

Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, Selasa (3/11) kemarin, mengatakan sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uang Jaminan Reklamasi Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, setiap pengusaha yang melaksanakan galian C dikenakan dana jaminan reklamasi sekitar Rp 50 juta. Jumlah biaya yang terbatas ini dikenakan untuk setiap satu hektar lahan galian. Dana reklamasi Rp 50 juta baru diberlakukan tahun 2010, dari sebelumnya hanya sekitar Rp 2,5 juta. Tetapi, tidak ada satu pun pengusaha yang mau bertanggung jawab usai menggali dengan melakukan reklamasi.

"Begitu selesai melakukan galian, kebanyakan pengusaha itu langsung kabur. Padahal, petunjuknya dia harus mereklamasi dulu, kemudian dicek oleh tim. Kalau proses reklamasinya sudah benar, baru dikeluarkan dananya," ujar Adnya Mulyadi. Lantaran tak pernah dimanfaatkan, dana reklamasi itu hingga kini sudah terkumpul

sebanyak Rp 2 miliar. Uang itu disimpan di rekening Bagian Ekonomi milik pihak ketiga. Untuk memanfaatkan dana itu, Sekda Adnya Mulyadi sempat memberikan beberapa petunjuk. Bisakah dana ini digabung dan digunakan untuk mereklamasi di tempat lain. Tetapi, tetap saja tidak boleh. Aturannya, di mana pengusaha itu melakukan galian, di tempat itu dana reklamasi ini harus digunakan.

Situasi ini menjadi dilematis bagi pemerintah daerah. Kalau dana reklamasi ditingkatkan lagi, nanti pengusahanya ribut lantaran dinilai terlalu berat. Kalau tidak ditingkatkan, peristiwa ini akan terus berulang. Sebab, dengan hitungan satu hektar dana reklamasi Rp 50 juta, sebenarnya jelas tidak cukup. "Bahkan, dengan dana reklamasi sebesar itu, para pengusaha dulu ada yang membayar dengan nyicil. Sekarang sudah tidak boleh," tegasnya.

Dilihat dari data izin usaha pertambangan bahan galian C Karangasem, hasil pen-

dataan Bagian Ekonomi Pemkab Karangasem, sejak tahun 2014 hingga kini, izin galian C hanya diterbitkan untuk lokasi galian di Kecamatan Bebandem dan Kubu. Dari 36 izin yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), hanya dua di antaranya berada di Kecamatan Bebandem. Yakni, atas nama I Nengah Birit dengan nomor izin 16/KPPT/2014 seluas satu hektar. Kedua, atas nama I Gusti Made Tusan (PT Dharma Bhuana Karya) dengan nomor izin 01/KPPT/2015 tertanggal

15 Januari 2015.

Sedangkan, 34 izin lainnya tersebar untuk sejumlah lokasi galian di Kecamatan Kubu. Seperti di Desa Tulamben (Banjar Dinas Batudawa Kelod), Baturinggih (Banjar Dinas Baturinggih Kelod), Suktadana (Banjar Dinas Mekar Sari, Lebah, Tigaron, Bukit, Nusu), dan Tianyar (Banjar Dinas Dharma Winangun). Lokasi galian masing-masing seluas satu hektar. Meski sudah tak lagi mengeluarkan izin, lokasi galian ilegal masih terus beroperasi. Seperti yang terlihat di Desa Sebudi belum

lama ini, aktivitas galian dengan mengeruk kaki Gunung Agung tersebut masih berlangsung.

Untuk proses pengeluaran izin galian C di Karangasem, selanjutnya bakal diambil alih Pemprov Bali. Saat ini, proses ini sedang dalam masa transisi dari Pemkab Karangasem kepada Pemprov Bali. Untuk diketahui, galian C menjadi penyumbang terbesar dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Karangasem. Tahun lalu mencapai Rp 82 miliar dari PAD keseluruhan mencapai Rp 239 miliar. (kmb31)

hal 2

Edisi : Rabu, 4 NOV 2015

Hal : 13



Pj. Bupati Monitoring Serapan APBDes

Tiga Desa di Kecamatan Kintamani



MONEV - Pj. Bupati Bangli Dewa Mahendra Putra didampingi tim saat melakukan kegiatan monev di tiga desa yang ada di Kecamatan Kintamani.

Bangli (Bali Post) -

Menindaklanjuti rendahnya serapan APBDes di sejumlah desa di Kabupaten Bangli Pj. Bupati Bangli I Dewa Gede Mahendra Putra, S.H., M.H. didampingi tim monitoring dan evaluasi (Monev) dari unsur BPMPD, Inspektorat dan SKPD terkait, melakukan monitoring di tiga desa yang ada di Kecamatan Kintamani. Adapun tiga desa yang dimonitoring, Senin (2/11), yakni Desa Terunyan, Songan A dan Songan B.

Kepala BPMPD I Dewa Agung Riana Putra dalam kesempatan tersebut mengatakan maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah sebagai tindak lanjut dari pemantauan Pj. Bupati terhadap neraca keuangan serta serapan keuangan di desa. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius Pj. Bupati yaitu mengenai ADD dan Dana Desa yang dikururkan pemerintah untuk dikelola dan dimanfaatkan desa, mengingat rentang waktu yang tersisa saat ini tinggal beberapa bulan lagi.

"Monitoring ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perhatian dan atensi kepada desa yang sedang



Sambungan

berproses. Jangan sampai terjadi minim serapan anggaran sesuai dengan pengamatan BPK, dimana terjadinya silpa yang cukup tinggi," imbuhnya. Sementara itu Kepala Inspektorat I Ketut Riang menyampaikan bahwa berdasarkan kacamata Lembaga Inspektorat yang bertugas mengawal, meluruskan dan mempercepat kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa itu sendiri, para aparatur desa dalam hal ini diharapkan memberi atensi yang lebih pada Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat. "Karena dana desa tersebut menjadi perhatian nasional di samping dengan dana-dana yang lainnya," imbuh Ketut Riang.

Pj. Bupati Bangli I Dewa Gede Mahendra Putra dalam kesempatan itu mengatakan, kedatangannya bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang timbul kaitannya dengan penyerapan anggaran yang masih belum maksimal. Baik dana ADD, BKK terlebih Dana Desa

yang sudah digelontorkan ke desa yang sekaligus merupakan atensi nasional. Selain itu dalam perkembangan terakhir sebagai tolak ukur kerja dan kinerja selaku kepala wilayah adalah bagaimana anggaran yang telah digelontorkan mampu disalurkan melalui program-program yang direncanakan secara matang dan efisien dengan selalu berpatokan pada asas ketaatan dan tidak melawan aturan. Di samping juga dengan menjalankan sinergi dan fungsi-fungsi lembaga yaitu LPM, BPD, Sekdes dan Kaur Desa.

"Karena bagaimanapun pembangunan itu adalah *bottom-up* dimana muara dari pembangunan itu adalah di desa," terangnya. Jelas Pj. Bupati mengenai permasalahan yang dihadapi baik SDM maupun lainnya, pihaknya menyerahkan kepada desa agar dipecahkan bersama-sama dan dikoordinasikan dengan dinas terkait yang membidangi. Sehingga dalam pemanfaatan dana yang ada tidak menyalahi aturan baik dari segi administrasi maupun penggunaannya. (ad0154)

hal 2

Edisi : Rabu, 4 Nov 2015

Hal : 8



Proyek Palang Pintu

Pasar Galiran Gagal

Anggaran Ratusan Juta Terbuang



Bali Post/dwa

MANUAL - Pasar Galiran masih menggunakan sistem manual akibat gagalnya proyek palang pintu sistem elektronik.

hal 1

Edisi : Rabu, 4 NOV 2015

Hal : 10



Semarapura (Bali Post) -

Upaya Pemkab Klungkung melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu atau *toll gate* dengan sistem elektronik di Pasar Galiran dipastikan gagal. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan anggaran Rp 498 juta dari APBD Klungkung untuk memodernisasi sistem parkir terbuang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Klungkung menerbitkan surat pengumuman pelelangan gagal bernomor XXV.07/ULP-POKJA IV/2015. Pekerjaan pemasangan palang pintu dengan sistem elektronik di Pasar Galiran itu dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Gagalnya proyek ini disebabkan tidak ada penyedia yang memasukkan dokumen penawaran hingga batas waktu pembukaan penawaran.

Dikonfirmasi terkait gagalnya proyek tersebut, Kadis Koperasi Kabupaten Klungkung Gede Kusumajaya mengaku tidak tahu pasti. Pihaknya telah menyerahkan seluruh proses tender kepada ULP

“Prosesnya sudah kami serahkan ke ULP,” tuturnya, Selasa (3/11) kemarin.

Rencana pemasangan palang pintu elektronik di Pasar Galiran akibat dugaan adanya pendapatan retribusi pasar yang mengalami kebocoran, mengingat pemungutan dengan sistem lama masih banyak kelemahan. Hal ini pula yang melatarbelakangi pemungutan retribusi parkir pasar dialihkan ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Klungkung per 1 Februari 2014.

Pemberlakuan sistem baru dalam pemungutan retribusi parkir di pasar tersebut sesuai arahan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sebagai upaya menekan kebocoran saat masih menerapkan sistem lama. Sebelumnya, pemungutan retribusi parkir di Pasar Galiran masih di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Parkir di areal pasar akan dikelola oleh Diskop, UKM, Perindag. Sementara di luar pasar, tetap menjadi kewenangan Dishubkominfo.

Rencananya disiapkan lima palang pintu. Tiga dipasang di Pasar Umum Galiran, sedangkan dua lagi di Pasar Semarapura. (dwa)



Rapat RAPBD 2016 Alot, Lalu Deadlock

Dalam rapat ada sejumlah SKPD tidak mengakomodir aspirasi anggota dewan. Hal itu membuat mereka tersinggung dan rapat pun ditutup begitu saja.

AMLAPURA, NusaBali

Rapat terbatas secara tertutup membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karangasem tahun 2016, berlangsung alot dan berujung deadlock. Bahkan segenap pimpinan

DPRD Karangasem mengaku bakal bersuara lebih keras lagi di rapat berikutnya dan lebih optimal melakukan kontrol kinerja eksekutif.

Segenap Ketua Fraksi di DPRD yang ikut rapat tertutup juga siap adu argumen mempertahankan aspirasinya, sehubungan semakin memanasnya Pilkada Karangasem. Sehingga dalam setiap mengambil keputusan nantinya dari 44 anggota DPRD, terbelah tiga kelompok.

Ketua Fraksi PDIP I Gede Dana, Ketua Fraksi Bhinneka I Ketut Sulandra, Ketua Fraksi Partai NasDem I Gede Putu Sudita menegaskan hal itu, usai rapat tertutup di DPRD Karangasem, Selasa (3/11).

Bocoran rapat tertutup itu, dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi, didampingi Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Adnyana,

I Made Wirta, Ketua Fraksi PDIP I Gede Dana, Ketua Fraksi Partai NasDem I Gede Putu Sudita, Ketua Fraksi Partai Golkar I Wayan Tama dan lain-lain. Juga hadir pimpinan eksekutif, Sekkab I Gede Adnya Muliadi, dan Kepala Bappeda I Ketut Sedana Merta.

Dalam pertemuan itu mulanya membicarakan draf R-APBD 2016. Hanya saja, alokasi DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) belum jelas dari pusat. Selanjutnya pembicaraan melebar, pimpinan fraksi mempertanyakan realisasi APBD Perubahan 2015, ada sejumlah SKPD tidak mengakomodir aspirasi anggota dewan. Atas argumen pimpinan fraksi tersebut, kurang mendapat respons eksekutif, maka dewan tersinggung rapat ditutup begitu saja.

Padahal agenda usai pertemuan terbatas, pukul 14.00 Wita,

sedianya menggelar rapat membahas R-APBD 2016 melibatkan seluruh pimpinan SKPD. Sege-nap pimpinan SKPD telah lama menunggu di ruang rapat, tiba-tiba dapat pemberitahuan, rapat batal, tanpa alasan yang jelas. Maka pimpinan SKPD juga turut kecewa, atas pembatalan rapat itu.

Usai rapat I Gede Dana, dengan lantang berujar, di rapat-rapat berikutnya berjanji bersuara lebih kencang. "Kalau untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, mesti keras. Agar tidak lagi ada masyarakat miskin, semuanya sejahtera dan semua warga miskin punya rumah," tegas I Gede Dana.

Pernyataan I Gede Dana didukung Wakil Ketua DPRD I Made Wirta. "Memang harus bersuara keras, kalau untuk perbaikan dan mengoptimalkan kontrol dewan terhadap kinerja eksekutif," jelas

I Made Wirta.

Ketua Fraksi Partai NasDem I Gede Putu Sudita juga berjanji bersuara lebih kencang. "Bersuara kencang sudah pasti, jangan sampai anggaran itu menguntungkan kelompok tertentu. Tunggu saja, kami akan gebrak di pembahasan nanti," janji Putu Sudita, yang didukung rekannya anggota Fraksi Partai NasDem I Made Juita.

Hal senada juga terucap dari Ketua Fraksi Bhinneka, I Ketut Sulandra. "Memang harus bersuara keras, sekarang saatnya kepentingan rakyat diperjuangkan. Bagi yang sejalan memperjuangkan kepentingan rakyat, ayo bersuara keras," jelasnya. Berbeda dengan Ketua Fraksi Partai Golkar I Wayan Tama. "Memperjuangkan kepentingan rakyat tidak mesti keras, bicara seperlunya," ucapnya datar. ☎ k16

Edisi : Rabu, 4 Nov 2015

Hal : 4



Tahun 2016, Dana Bansos Turun 96,85 Persen

Singaraja (Bali Post) -

Alokasi anggaran dana bantuan sosial (bansos-red) tahun 2016 mendarang mengalami penurunan hingga 96,85 persen. Tahun 2015 Buleleng mengalokasikan anggaran belanja bansos Rp 4,7 miliar. Jumlah ini turun drastis tahun 2016 mendarang Rp 150 juta.

Penurunan alokasi dana belanja bansos ini dirancang hanya untuk menjawab permasalahan sosial di tengah masyarakat. Berbeda dengan pos anggaran belanja hibah yang dirancang naik tahun depan, karena pemkab harus memenuhi permohonan kebutuhan anggaran dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Selain itu, janji pemkab melunasi bonus atlet dan ofisial yang telah berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali.

Berdasarkan nota pengantar Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Buleleng tahun 2016 yang disampaikan Bupati Putu Agus Suradnyana belum lama ini, dikatakan tahun 2015 alokasi dana

bansos sebesar Rp 4,7 miliar lebih. Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp 150 juta atau 96,85 persen. Jika alokasi dana bansos menurun drastis, namun untuk porsi anggaran belanja hibah dirancang naik sebesar 94,13 persen. Tahun ini, belanja hibah dianggarkan Rp 35,3 miliar lebih. Tahun 2016 mendarang anggarannya naik menjadi Rp 68,7 miliar lebih.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka mengatakan hal itu, Selasa (3/11) kemarin. Menurutnya, secara umum rancangan RAPBD tahun 2016 ini semua pos anggaran sifatnya masih sementara. Alasannya, masih menunggu kepastian kucuran dana perimbangan seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Sejatinya pemerintah pusat telah memberikan kepastian menangani besarnya alokasi dana perimbangan dari pusat ini 30 Oktober 2015 lalu. Namun, hingga ke-

marin, secara resmi kepastian kucuran dana pusat itu belum diterima, sehingga TAPD belum juga menetapkan secara final pos anggaran termasuk untuk belanja bansos dan belanja hibah. "Dalam RAPD yang sudah disusun itu belum final dan semua masih perencanaan sementara. Usulan nilainya masih mengacu anggaran tahun sebelumnya. Kepastian kucuran dana pusat belum kita terima dan baru sebatas informasi lisan. Kami masih menunggu kepastian kucuran dana pusat itu," katanya.

Untuk anggaran belanja hibah terdongkrak naik. Salah satunya pemerintah harus membayar lunas bonus atlet dan ofisial atlet Porprov Bali yang lalu. Pertimbangan lain organisasi kemasyarakatan yang akan membutuhkan dana hibah tergolong tinggi seperti Pramuka, P2-M, kelompok subak dan organisasi lainnya. Organisasi kemasyarakatan seperti ini dalam mengelola dana hibah yang didapat juga lebih leluasa berkreasi. (kmb38)

Edisi : Rabu, 4 NOV 2015

Hal : 13